

## **BAB I**

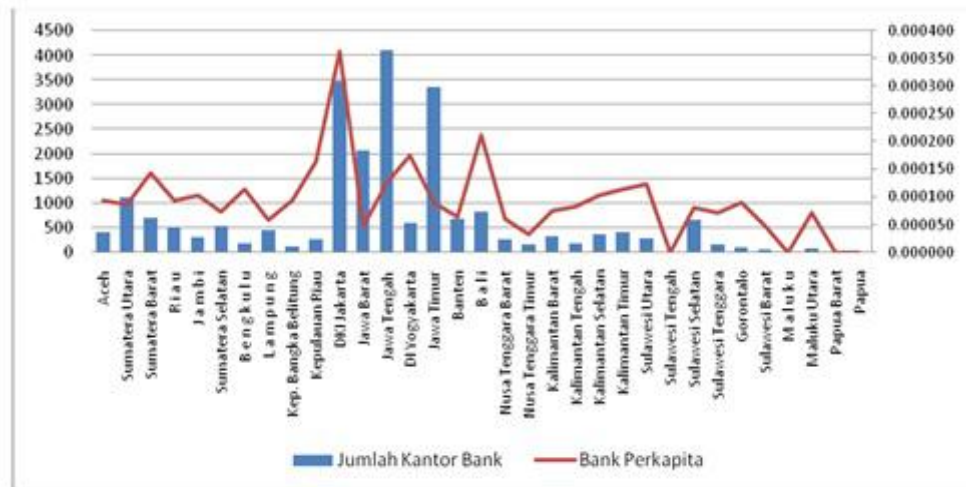
### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perbankan merupakan lembaga intermediasi atau lembaga yang menjembatani antara nasabah yang surplus dana dengan nasabah yang defisit dana. Dalam perannya tersebut, perbankan harus membantu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada level ekonomi yang lebih luas, bank mempunyai tugas sebagai sarana transmisi dari kebijakan moneter. Sedangkan pada level ekonomi yang lebih sempit, bank merupakan sumber utama pembiayaan bagi masyarakat (pengusaha atau individu) (Konch, 2000:4). Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat memerlukan dukungan industri perbankan yang sehat, efisien dan modern.

Perbankan sebagai lembaga intermediasi harus mempertimbangkan salah satu faktor yang terpenting yaitu masyarakat. Oleh karena itu, kepadatan penduduk dan populasi masyarakat merupakan hal yang menjadi pertimbangan terkait pendirian kantor bank. Kepadatan bank dapat dilihat dari jumlah atau ukuran pasar, yaitu jumlah bank per seribu penduduk. Namun, masih ada beberapa provinsi yang memiliki jumlah penduduk banyak namun hanya terdapat sedikit kantor bank. Meskipun pertumbuhan rasio jumlah bank di

Indonesia selalu meningkat setiap tahun akan tetapi masih banyak penduduk Indonesia yang belum mempunyai tabungan ataupun merasakan fasilitas pembiayaan dari perbankan (*unbanked people*). Kurang dari 50 persen penduduk Indonesia yang memiliki rekening di bank dan hanya 17 persen penduduk yang mempunyai akses pembiayaan (hasil survei Bank Dunia tahun 2014). Pada lingkup ASEAN, masyarakat Indonesia tergolong negara yang memiliki jumlah rekening terendah dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN. Kondisi alam Indonesia yang berkepulauan dan minimnya sarana infrastruktur menjadi salah satu faktor penyebab terhambatnya akses perbankan ke masyarakat (Punky Purnomo, 2013:4). Hal tersebut menjadi hambatan yang dirasakan oleh masyarakat dalam memperoleh layanan dari lembaga perbankan. *Unbanked people* selain disebabkan karena keterbatasan infrastruktur, hal tersebut juga disebabkan karena rendahnya penghasilan masyarakat menengah ke bawah. Biasanya penghasilan yang diperoleh masyarakat pedesaan lebih banyak digunakan untuk sektor konsumtif (Punky Purnomo, 2013:5). Gambar 1 menunjukkan jumlah kantor bank dan pertumbuhan rasio jumlah bank perkapita di setiap provinsi di Indonesia.

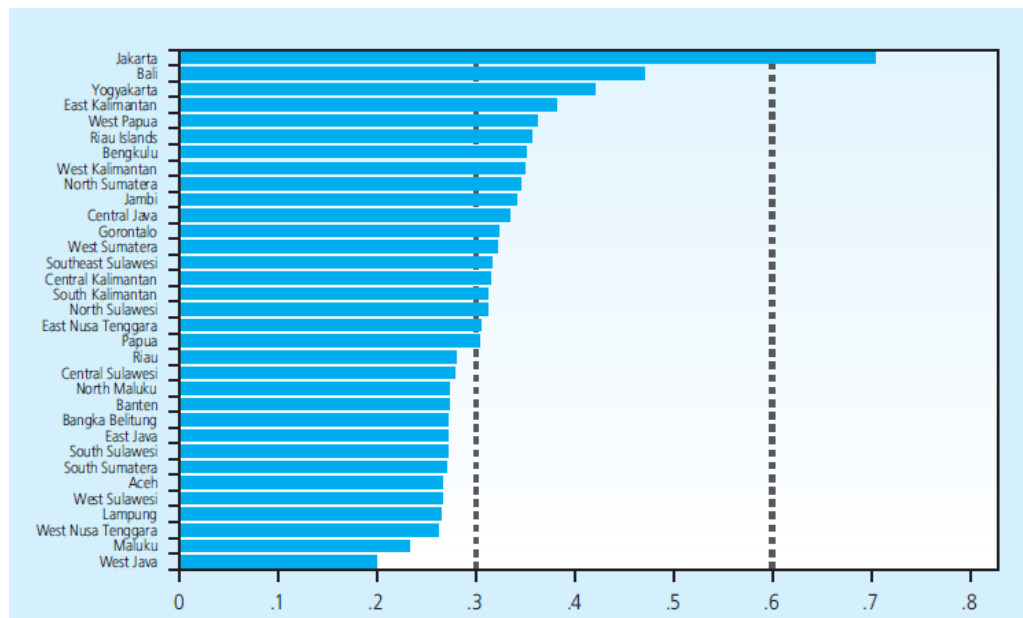


**Sumber** : Statistik Perbankan, Bank Indonesia, diolah

**Gambar 1.1 Jumlah Bank Perkapita pada Maret 2012**

Pada gambar 1.1 dapat dilihat bahwa provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut (DI Yogyakarta) menempati urutan ketiga tingginya pertumbuhan bank perkapita nasional, setelah DKI Jakarta dan Bali. Hal ini dikarenakan DI Yogyakarta merupakan salah satu kota pariwisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun internasional. Namun dari tiga kota dengan rasio pertumbuhan bank perkapita tinggi tersebut, DI Yogyakarta merupakan kota dengan tingkat literasi dan inklusif keuangan terendah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BI di awal tahun 2016, angka literasi keuangan dan inklusif keuangan DI Yogyakarta hanya sebesar 21,8 persen. Angka tersebut tentunya tertinggal jauh dari dua provinsi lain yaitu Bali

dan DKI Jakarta. Angka literasi dan inklusif keuangan Bali pada tahun 2013 mencapai 71,25 persen. Hal tersebut juga sesuai dengan data pada gambar 2 yang menunjukkan nilai IFI (*Index of Inclusion*) di 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2014.



**Sumber :** Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 18 Nomor 3, Januari 2016

**Gambar1.2 Nilai IFI (*Index of Financial Inclusion*) 2014**

Gambar 1.2 menyajikan nilai IFI (*Index of Financial Inclusion*) di 33 provinsi di Indonesia pada akhir tahun 2014. Provinsi di atas dibagi menjadi tiga kategori dalam pengukuran IFI. Provinsi dengan kategori nilai IFI paling rendah (kurang dari 0,3) adalah provinsi Jawa Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Aceh dan Sumatera Selatan. Kemudian provinsi dengan nilai IFI medium (antara 0,3 dan 0,6) adalah provinsi Bali, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Papua Barat dan Bengkulu. Provinsi dengan nilai IFI tinggi

(antara 0,6 dan 1) adalah provinsi DKI Jakarta. DKI Jakarta memiliki nilai IFI tertinggi di Indonesia disebabkan karena provinsi tersebut merupakan ibukota negara dengan tingkat aktivitas perekonomian yang tinggi. DI Yogyakarta dengan rasio pertumbuhan perbankan yang tinggi, seharusnya bisa menduduki provinsi dengan nilai IFI tinggi atau paling tidak angkanya seharusnya sama dengan Bali. *Financial Inclusion* adalah kondisi dimana masyarakat mempunyai akses yang lebih mudah terhadap jasa keuangan atau dengan kata lain merupakan sebuah proses untuk menyediakan layanan jasa keuangan kepada masyarakat luas dan masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan harga terjangkau.

Rendahnya angka inklusif keuangan di beberapa provinsi di Indonesia ini disebabkan karena belum tersedianya produk perbankan yang sesuai untuk kelompok masyarakat menengah ke bawah dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang keuangan. Masyarakat menengah ke bawah atau yang berpendapatan rendah merupakan golongan yang paling membutuhkan akses atau bantuan dari lembaga keuangan (*active money charger*). Untuk itu, sangat diperlukan adanya terobosan dan inovasi agar seluruh masyarakat dapat menikmati jasa layanan keuangan dari perbankan. Akhirnya beberapa kebijakan dalam rangka penguatan ketahanan, daya saing perbankan, sekaligus penguatan fungsi intermediasi perbankan dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Ditinjau dari salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2013 yaitu program *branchless banking* untuk memperluas akses keuangan

masyarakat maka Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat (OJK) mengeluarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif.

Pembukaan kantor cabang bank di suatu wilayah tentunya memerlukan investasi dan biaya operasional yang tidak sedikit nominalnya. Gambaran rata-rata biaya investasi yang dibutuhkan sekitar 1,5 miliar rupiah dengan biaya operasional tahunan sekitar 900 juta rupiah per kantor (Refky Fielnanda, 2016:4). Lokasi pembukaan kantor cabang bank lebih banyak di daerah perkotaan yang padat penduduk. Hal ini dikarenakan potensi bisnis pada daerah perkotaan jelas terlihat menguntungkan bagi perbankan. Meskipun ada di wilayah *rural area*, sudah dapat dipastikan daerah tersebut merupakan area yang padat aktivitas ekonomi sehingga secara ekonomis bank melihat kemungkinan yang menguntungkan apabila membuka kantor cabang bank di daerah tersebut.

Pada pertengahan hingga akhir tahun 2013 tepatnya bulan Mei hingga November, Bank Indonesia melakukan uji coba atau uji kelayakan terhadap salah satu program kebijakan BI yaitu layanan *branchless banking* atau dikenal dengan sebutan “Laku Pandai” dengan menggandeng beberapa bank diantaranya adalah BRI, BTPN, Bank Mandiri dan BCA. Dari hasil uji coba tersebut ternyata kebijakan *branchless banking* mendapat apresiasi yang cukup baik dari masyarakat terutama pelaku kegiatan uji coba yaitu perbankan. Hal tersebut terlihat dari peningkatan jumlah transaksi dan jumlah rekening nasabah

(<http://www.bi.go.id>). Layanan *branchless banking* merupakan layanan transaksi perbankan untuk mewujudkan keuangan inklusif. *Branchless banking* memiliki beberapa kriteria antara lain yaitu tanpa melalui kantor cabang bank, mendayagunakan agen yang bekerjasama dengan bank, nasabah dapat melakukan transaksi sendiri, proses transaksi yang sederhana, layanan lebih murah dan yang paling penting adalah layanan ini diperuntukan untuk segmen menengah ke bawah (Refky Fielnanda, 2016:4). Namun, uji coba layanan *branchless banking* ini belum diterapkan pada perbankan syariah.

Penerapan program *branchless banking* bagi bank syariah juga sangat penting guna mendorong pertumbuhan perbankan syariah dan tercapainya inklusif keuangan yang diharapkan mampu menjadi suatu instrumen keuangan baru untuk mengurangi kemiskinan. Dalam hal daya saing, mengingat pangsa pasar perbankan syariah yang hanya kurang lebih sekitar 5 persen, maka penerapan *branchless banking* merupakan peluang yang besar bagi perbankan syariah. *Branchless banking* dengan penggunaan modal yang relatif lebih sedikit dan efisien jika dibandingkan dengan pendirian kantor cabang, merupakan sebuah keuntungan dan peluang bagi perbankan syariah.

Bank Central Asia Tbk (BCA) sebagai salah satu bank swasta terbesar di Indonesia, menegaskan komitmennya terhadap layanan *branchless banking* dengan meluncurkan *low cost payment network* pada Senin tanggal 21 Desember 2015 di Jakarta. *Low cost payment network* akan memberikan

manfaat besar bagi masyarakat dengan biaya yang cukup rendah serta jangkauan yang semakin besar. Layanan ini terwujud berkat kerja sama BCA dengan *Indepay Networks* yang berbasis di Singapura. *Indepay* telah terbukti berhasil menangani inklusif keuangan di India selama beberapa tahun terakhir. Kerja sama BCA dengan *Indepay* ini mencakup penggunaan teknologi, sistem kontrol dan basis data ([www.swa.co.id](http://www.swa.co.id)). Beberapa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat diantaranya adalah adanya kemudahan akses layanan keuangan tanpa perlu ke kantor cabang, berbagai pilihan produk terjangkau, dekat dengan domisili sehingga menghemat waktu dan biaya, dan dapat bertransaksi kapanpun tanpa dibatasi jam kantor dan hari libur. Selain itu, para agen juga merasakan manfaat tersendiri yakni mendapat penghasilan tambahan, meningkatkan kemampuan agen di bidang layanan keuangan dan yang terpenting menambah segmen pelanggan. Sementara dengan penerapan kebijakan tersebut, perbankan juga merasakan manfaat berupa pertumbuhan transaksi, kemudahan pengembangan jaringan perbankan, terdorongnya efisiensi dan peningkatan loyalitas pelanggan. Akan tetapi hal ini belum dilaksanakan oleh BCA Syariah selaku anak bank dari BCA konvensional.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Syeda Samana Abbas di Pakistan pada tahun 2015, merekomendasikan agar program *branchless banking* ditumbuhkembangkan di Lahore Pakistan dikarenakan program ini sangat membantu menumbuh kembangkan akses keuangan masyarakat. Kemudian



penelitian yang dilakukan oleh Disha Bhanot di India pada tahun 2012 mengindikasikan pentingnya penerapan program *branchless banking* bagi perbankan dan masyarakat India. Hal ini ditunjukkan dengan hasil eksplorasi faktor-faktor yang sangat berperan dalam meningkatkan inklusif keuangan bagi daerah yang terpencil. Hal-hal tersebut di atas, mendorong adanya program *branchless banking* di negara-negara Asia Pasifik, Afrika dan Amerika latin. Dengan latar belakang di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang **“Analisis Kebijakan *Branchless Banking* di Perbankan Syariah dalam Mencapai *Financial Inclusion* (Studi Kasus pada BCA Syariah Kantor Cabang Yogyakarta)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penyusunan penulisan ini, diantaranya adalah :

1. Bagaimana analisis kebijakan *branchless banking* yang akan diterapkan oleh BCA Syariah Cabang Yogyakarta?
2. Bagaimana analisis SWOT dari penerapan program *branchless banking*?
3. Bagaimana kebijakan *branchless banking* dapat mencapai *financial inclusion* di DI Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diperoleh beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Mampu mengetahui hasil analisis kebijakan *branchless banking* yang akan diterapkan oleh BCA Syariah Cabang Yogyakarta.
2. Mampu mengetahui kelebihan, kekurangan, peluang dan ancaman dalam analisis SWOT pelaksanaan program *branchless banking*.
3. Mampu mengetahui penerapan *branchless banking* oleh perbankan syariah dalam rangka pencapaian *financial inclusion* di DI Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas, maka akan diperoleh beberapa kegunaan (manfaat) yang dapat diambil dari penelitian ini, antara lain :

##### **1. Akademik**

- a. Dapat memberikan wawasan yang lebih luas bagi pembaca mengenai masalah yang berkaitan dengan penerapan kebijakan *branchless banking* bagi perbankan syariah.
- b. Sebagai referensi penelitian di bidang keuangan dan perbankan syariah.
- c. Diharapkan dapat menjadi dokumen yang berguna untuk dijadikan acuan bagi bidang akademik.
- d. Sebagai perbandingan antara teori dengan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan.

##### **2. Praktisi**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan informasi dalam mengambil kebijakan terutama mengenai penerapan

*branchless banking*. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi sebagai masukan untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kinerja keuangan perbankan syariah.